

Implikasi hukum penggunaan dokumen atau keterangan palsu dalam perkawinan poligami menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Niken Rahayu, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=88456&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkawinan poligami di Indonesia belakangan terlihat di permukaan dan menjadi wacana dalam pergaulan hidup masyarakat dengan diberikan penganugerahan poligami award kepada pelaku poligami yang dipandang sukses dalam rumah tangga dan pekerjaan, yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra dengan pemberian award tersebut, hal ini telah membuktikan bahwa sesungguhnya perkawinan poligami ini telah lama terkurung dalam wilayah perdebatan yang tidak ada habishabisnya. Undang-undang telah mengatur syarat-syarat yang telah ditentukan bagi suami yang hendak menikah lagi dengan mempertimbangkan kepentingan isteri. Syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan tidak dijalankan sebagaimana mestinya tetapi prakteknya di masyarakat Poligami dapat dilaksanakan. Tidak ada sanksi tegas untuk pelaku poligami yang tetap melaksanakan poligami tanpa izin dari isteri pertama dan tanpa proses Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana keabsahan status perkawinan poligami yang dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau keterangan palsu menurut UU.NO.1 Tahun 19974 dan bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.